

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Samuel Huntington dalam bukunya *The Third Wave* menjelaskan : dalam *Democratization in the Late Twentieth Century* (1991) dari tahun 1974 hingga tahun 1990-an merupakan gelombang demokrasi dunia. Huntington menjelaskan tentang adanya peristiwa kudeta yang berhasil menggulingkan Diktator yang telah lama memegang kekuasaan di Portugal, dimana kemudian hal ini merupakan awal periode gelombang ketiga demokratisasi dunia. Dalam lebih dari 15 tahun berikutnya, gerakan ini kemudian terjadi di lebih dari 30 negara yang mengalami perubahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi demokrasi, dan sekurangnya 20 negara telah turut serta dalam gelombang ini.

Tumbangnya rezim otoriter di belahan dunia ketiga seperti misalnya yang terjadi di Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Para pengamat menilai gelombang ini tidak akan mungkin dibendung. Namun rasa optimis terhadap gelombang ini tidak sejalan dengan kenyataan yang dialami negara dengan kegagalan

negara Myanmar, seberapa kuat gelombang demokrasi di Myanmar, pihak militer juga akan semakin keras membendungnya.¹

Negara Myanmar, yang dulunya bernama Burma, merupakan sebuah negara yang berada di wilayah Asia tenggara, dimana secara geografis Myanmar menjadi salah satu anggota dari Association of South East Nation (ASEAN). Sebuah asosiasi negara-negara di kawasan asia tenggara yang terbentuk pada 8 Agustus 1967.

Negara yang memperoleh kemerdekaanya dari Inggris pada 4 Januari 1948² ini, terdiri dari penduduk yang multi etnis. Etnis mayoritas adalah etnis Burma atau Bama yang mencapai hingga 68 % dari jumlah penduduk. Etnis ini kemudian yang menjadi penguasa. Sedangkan berbagai etnis lainnya seperti Mons, Kapen, Karenni, Arakan, Naga, Shan, Pyu dan Kachin termasuk dalam golongan etnis-etnis miyoritas dan tersebar di sepanjang perbatasan negara ini dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, China, Laos, Bangladesh dan India.³

Myanmar memiliki hubungan yang bisa dibilang sangat kuat dengan dua negara tetangganya, yaitu China dan India. Para pejabat militer yang menguasai pemerintahan pernah berkiblat pada sistem pemerintahan a la China, pada saat Mao Tse Tung menjadi pemimpin pemerintahan komunis di China. Hal ini lah yang kemudian membuat hubungan Cina dan Myanmar terjalin erat hingga kini. Walaupun demikian, kemajuan ekonomi China, tidak memberi dampak positif

¹ Jurnal Universitas Paramadina Vol. 2, No. 2, Januari 2003, hal 128-129

² CIA The World Fact Book, yang diakses pada Senin 9 May 2011

³ http://www.berpolitik.com/static/myposting/2007/11/myposting_249.html, "Sekelumit

terhadap perekonomian Myanmar yang kini sedang berada di masa kritis.⁴ Hubungan Myanmar dengan India dimulai sejak Myanmar pernah disatukan dengan India pada masa penjajahan Inggris. Penyatuan wilayah ini bertujuan untuk mempermudah Inggris dalam mengontrol daerah jajahannya. India lah yang secara tidak langsung menularkan rasa nasionalisme yang tinggi pada Myanmar. Junta militer yang menguasai Myanmar sejak tahun 1962, pernah mengadopsi Sistem Ekonomi Campuran antara Sosialisme dan Kapitalisme.

Bentuk Pemerintahan yang dianut oleh Myanmar adalah Junta Militer selama hampir 50 tahun, terhitung sejak tahun 1962, pada saat terjadinya kudeta militer yang dilakukan oleh Jendral Ne Win terhadap kekuasaan syah partai U Nu. Belum lama ini, tepatnya pada 30 Maret 2011, Myanmar telah melantik seorang Presiden setelah dilangsungkannya pemilihan umum. Dimana hal ini berarti pembubaran Dewan Perdamaian dan pembangunan Negara (*The State Peace and Development Council / SPDC*) yang dipimpin oleh Jendral Than Shwe, seperti yang dikutip dalam sebuah keputusan yang dibuat oleh Than Shwe.⁵ Namun sayangnya, Pemilu ini dinilai belum demokratis, karena meskipun demikian, Presiden yang memegang tanpuk kekuasaan tersebut masih dari kalangan militer, yaitu dengan menunjuk jendral purnawirawannya, Jendral Thein Sein. Sehingga masih menimbulkan kecurigaan atas adanya usaha Junta Militer dalam merekayasa terhadap hasil Pemilu.⁶

⁴*Ibid.*

⁵<http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-myanmar-terbentuk-junta-militer-dibubarkan/5095>, yang diakses pada hari Senin, 9 Mei 2011

⁶<http://internasional.kompas.com/read/2011/02/04/14500753/Presiden.Baru.Myanmar.Tetap>.

Myanmar turut berpartisipasi dalam event Bali Democracy Forum yang diadakan oleh Indonesia. Tepatnya pada event Bali Democracy Forum II, pada tahun 2008, yang berlangsung selama tiga hari di Nusa Dua, Bali.

Myanmar yang terkenal dengan sikapnya yang sangat anti demokrasi, mengambil keputusan untuk turut berpartisipasi dalam event demokrasi terbesar tingkat asia, memunculkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Arus demokrasi yang dibendung selama puluhan tahun di bawah kekuasaan junta militer, kini nampaknya mulai menunjukkan perkembangan, dengan adanya partisipasi negara yang dikuasai junta militer pada even Bali Democracy Forum ini.

Bali Democracy Forum (BDF) merupakan sebuah forum tukar pendapat hasil prakarsa Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik di antara negara-negara di kawasan Asia. Indonesia merupakan negara penganut Sistem Demokrasi Terbesar Ketiga di Dunia, setelah posisi pertama dan kedua yang masing-masing ditempati oleh India dan Amerika Serikat.

Forum ini tidak bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi.⁷

⁷<http://www.antaraneews.com/view/?i=1226239596&c=INT&s=>, diakses pada 1 November 2010

Delegasi dari Negara yang hadir dalam forum ini membahas dan saling bertukar pendapat maupun pengalaman mengenai perkembangan demokrasi yang dialami di masing masing Negara peserta. Bali Democracy Forum (BDF) tidak bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi.⁸ Bali Democracy Forum merupakan inisiatif Indonesia sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi.⁹

Event *Bali Democracy Forum* merupakan *annual event* (even tahunan) yang telah diadakan sejak tahun 2008. *Bali Democracy Forum I* telah dilaksanakan di Nusa Dua Bali, pada 10 – 11 Desember 2008, dengan mengambil tema “ *Building and Consolidating Democracy : Strategic Agenda for Asia*”. Event ini dihadiri oleh 40 negara peserta dan peninjau, dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Negara-negara tersebut antara lain adalah negara yang telah menganut sistem pemerintahan yang demokratis seperti Jepang, Timor Leste, Australia, Singapura, Korea, dan juga yang non demokratis seperti misalnya Qatar dan Vietnam.

Kemudian diikuti dengan pelaksanaan event Bali Democracy Forum II yang diselenggarakan pada tanggal 10 – 11 Desember 2009, di tempat yang sama, Nusa Dua, Bali. “*Promoting Synergy between Democracy and Development in Asia : Prospects for Regional Cooperation*” yang menjadi tema pada kesempatan kali ini. Terdapat sebanyak 48 negara peserta dan negara peninjau yang hadir dalam acara

⁸ http://balidemocracyforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=127:emp-at-&catid=45:news-on-bdf&Itemid=128, diakses pada 1 November 2010

⁹ <http://www.detiknews.com/read/2009/06/08/120707/1144019/10/dirjen-idp-deplu-jelaskan->

kedua ini. Negara-negara tersebut antara lain adalah Myanmar, Iraq, Qatar, Filipina, Papua Nugini, Selandia Baru, Mongol, Nepal, Laos, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 9 – 10 Desember 2010 yang lalu, BDF kembali dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk yang ketiga kalinya di Nusa Dua, Bali. Pada kesempatan ini, ada sebanyak 71 negara peserta dan peninjau, dengan 4 Kepala Negara / Kepala Pemerintahan, 18 menteri dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Jepang, Republik Korea, Malaysia, Singapura dan Astralia adalah sebagian dari negara yang menganut sistem demokratis yang menjadi peserta event tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang tersebut, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan sebagai berikut :

Mengapa Myanmar turut berpartisipasi dalam event Bali Democracy Forum yang diselenggarakan oleh Indonesia ?

C. Kerangka Teori

Teori adalah penjelasan yang paling umum, yang dapat memberitahu kita

apa yang akan terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Maka dari itu

selain penggunaannya untuk eksplanasi, teori juga merupakan dasar sebuah prediksi. Dengan kata lain, teori juga dapat sebagai sesuatu yang terjadi atau akan terjadi.¹⁰

Dalam rangka untuk membantu menjelaskan permasalahan yang ada, maka akan digunakan 3 buah konsep sebagai kerangka pemikiran, yaitu konsep demokrasi, konsep pengambilan keputusan dan konsep tekanan.

1. Konsep Demokrasi

Dalam dua dasawarsa terakhir ini, sistem demokrasi berkembang pesat sejalan dengan proses globalisasi, sehingga hampir semua negara dan bangsa di dunia ini menyifati sistem politik mereka sebagai sistem yang demokratis. Memang disadari bahwa demokrasi tak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Tetapi dalam sejarah modern ini, system ini telah menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan sistem lain, yang dapat dilihat dari segi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pergantian kekuasaan secara damai, penyelesaian perbedaan-perbedaan atau konflik secara beradab, kontrol terhadap penyelenggaraan negara, dan sebagainya. Meski demikian, bentuk atau konsep demokrasi ini sangat bervariasi dan terdapat perbedaan antara satu negara dan negara lain.¹¹

¹⁰ Moehtar Mas' oed, Ilmu Hubungan International : Disiplin Dan Metodologi, LP3ES, Jakarta 1990

Konsep pemikiran berdemokrasi tidak hanya berasal dari Barat. Konsep serupa juga hidup dalam tradisi bermasyarakat di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur. Tradisi itu konkretnya antara lain berupa berembuk secara demokratis, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Meski begitu, perkembangan demokrasi di Indonesia masih membutuhkan perjuangan panjang. Persoalannya, karena masih terdapat perbedaan komitmen di antara masyarakat dan para pemimpin bangsa. Di Indonesia, harapan dan perjuangan akan berkembangnya budaya demokrasi hanya menjadi komitmen masyarakat. Sementara para pemimpinnya malah tidak memiliki komitmen yang sama.¹²

Pendidikan demokrasi

Pendidikan demokrasi memiliki pengertian sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk dapat memberikan fasilitas kepada individu warga negaranya agar memahami, mehayati, mengamalkan serta mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di dalam masyarakat (Winataputra, 2006 : 12)

Demokrasi memang tidak dapat untuk diwariskan, akan tetapi dapat ditangkap dan dipelajari melalui berbagai proses belajar, maka dari itu dalam memahaminya membutuhkan suatu proses pendidikan demokrasi.

¹²http://www.gusdur.net/Berita/Detail/?id=106/hl=id/Konsep_Demokrasi_Merupakan_Tradisi_Masyarakat_Indonesia, diakses pada 29 November 2010

Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (yang didapat disekolah dan perguruan tinggi), non formal (pendidikan diluar sekolah dan informal, seperti misalnya : pergaulan dirumah dan masyarakat kultural untuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks) (Winaputra,2006:19)

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sebuah sistem yang diimpikan oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, berbagai usaha yang dilakukan untuk meraih kehidupan demokrasi yang sempurna bisa dikatakan tidak mudah. Proses penerapan demokrasi inilah yang merupakan sistem politik dalam kehidupan bernegara.

Pendidikan demokrasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang berdasarkan pada beberapa ciri berikut ini :

- a. Proses yang tidak pernah selesai, dalam artian, dilakukan dengan cara bertahap, berkesinambungan, secara terus – menerus.
- b. Bersifat evolusioner dalam arti dilakukan secara perlahan.
- c. Perubahan bersifat damai dalam arti tanpa kekerasan (anarkis)
- d. Berjalan melalui cara musyawarah; dalam artian, berbagai perbedaan

Jadi, budaya demokrasi dimasyarakat akan terbentuk jika nilai – nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan prilaku hidup pada hakikat nya budaya demokrasi akan mengembangkan nilai – nilai demokrasi

Menurut Robert A. Dahl dalam bukunya “*Polyarchy, Participation and Opposition*” , terdapat 3 Indikator Negara Demokratis, adalah sebagai berikut ini:

1. Tingkat Partisipasi

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, maka akan semakin demokratis. Karena masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya dan ikut serta dalam proses pemerintahan.

2. Tingkat Persaingan (*Contestration*)

Adanya tingkat persaingan yang semakin tinggi, sehingga semakin demokratis pula. Dalam hal ini, tidak ada suatu lembaga atau bagian yang berkuasa mutlak atau memonopoli, seperti misalnya ada banyak partai pemilu dan tidak ada satu partai besar yang memonopoli, dan sebagainya.

3. *Mutual Security Relationship (between Ruler and Oposition)*

Dalam hal ini, Pemerintah yang berkuasa (Ruler) dan pihak oposisi (Oposition) bersikap saling percaya dan bermaksud baik satu sama lain. Dimana pemerintah tidak memojokkan pihak oposisi, demikian juga sebaliknya, pihak Oposisi tidak

Pihak militer mulai bercampur tangan pada pemerintahan Myanmar, pada saat penugasan Jendral Ne Win dalam mengontrol ketertiban dan persiapan pemilu 1960, dimana Jendral Ne Win akhirnya dapat memulihkan keadaan dalam Negeri. Kemudian pihak militer mengultimatum pemerintah sipil pemenang pemilu, U Nu dan Union Party, dengan memberikan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi di Myanmar. Karena kegagalan U Nu, akhirnya dengan dipimpin Jendral Ne Win militer melakukan kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa, ini lah yang menjadi titik balik kehancuran demokrasi di Myanmar.

Berkuasanya junta militer, memunculkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dimana hal tersebut dapat mengancam keamanan dan perdamaian, baik di Myanmar sendiri maupun di dunia internasional. Junta militer membungkam rakyat Myanmar dengan menutup kesempatan bagi rakyat Myanmar untuk menyuarakan pendapat dan meminimalkan seminimal mungkin akses informasi dari dan ke dunia luar. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah serasa tidak memiliki batasan yang konkrit.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem demokrasi yang sangat diinginkan oleh rakyat Myanmar. Dimana mereka (rakyat di negara yang menganut sistem demokrasi) mendapat jaminan untuk dapat menyuarakan pendapatnya, dilindungi berbagai hak asasinya dalam undang-undang, serta pemerintahan yang memiliki batasan kekuasaan.

Kawasan Asia masih mengalami ketertinggalan dalam konteks Demokrasi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan juga sebagian

menjabat sebagai ketua ASEAN, dengan menyadari kebutuhan untuk memasukkan agenda demokrasi dalam ASEAN, Indonesia mengedepankan konsep *ASEAN Political and Security Community*. Hal tersebut yang kemudian menjadi sebagian latar belakang bagi Indonesia untuk menyelenggarakan event demokrasi yang pertama kalinya di kawasan Asia, yaitu Bali Democracy Forum.

Bali Democracy Forum merupakan sebuah event yang ditangani Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, yang bertujuan mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik di antara negara-negara di kawasan Asia. Forum ini tidak bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi.¹³

Delegasi dari Negara yang hadir dalam forum ini membahas dan saling bertukar pendapat maupun pengalaman mengenai perkembangan demokrasi yang dialami di masing masing Negara peserta.

Bali Democracy Forum diadakan untuk pertama kalinya pada Desember 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali. Myanmar menjadi salah satu negara peserta yang hadir dalam annual event tersebut. Di tengah berbagai kontroversi yang muncul dengan keikutsertaan Myanmar, sebuah negara otoriter, dalam event demokrasi ini langsung dapat membuktikan bahwa Myanmar memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan dalam negerinya, salah satunya dengan memperdalam demokrasi.

Pada awal Februari 2011, Myanmar mengangkat seorang Jendral Purnawirawannya sebagai Presiden, Tin Aung Nyin Oo.¹⁴ Hal ini sebagai hasil dari pemilu yang diadakan junta militer di penghujung tahun 2010. Walaupun begitu, banyak pihak beranggapan bahwa pengangkatan jendral purnawirawan yang termasyhur ini menjadi bukti bahwa junta militer masih tetap berkuasa.

Pada masa sekarang ini, sebuah pemerintahan yang dibesarkan dengan berpondasikan sistem otokrasi dan otoriter dirasa sudah tidak pada tempatnya lagi. Semua pihak tentulah memiliki harapan kepada Myanmar, agar negara tersebut dapat segera menyelesaikan berbagai krisis, terutama krisis politik yang terjadi di wilayahnya, sehingga Myanmar dapat membawa rakyatnya untuk berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Myanmar membutuhkan sebuah kepemimpinan baru dan sistem baru yang berasakan demokrasi, menjauhkan rakyat myanmar dari krisis yang berkepanjangan, dapat membuka diri terhadap dunia luar, dan dapat mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat myanmar.

Negara-negara yang menganut system demokratis akan cenderung untuk bekerjasama. Peluang terjadinya perang antara sesama Negara demokratis lebih kecil dibanding peluang terjadinya perang antara Negara demokratis dengan Negara non-demokratis. seperti yang dikatakan Michael Mandelbaum dalam tulisannya , *Democracy and Peace*.¹⁵

¹⁴<http://www.rimanews.com/read/20110212/16416/pemimpin-myanmar-desak-rakyat-agar-selalu-lindungi-demokrasi>, yang diakses pada Selasa, 9 Mei 2011

¹⁵ Mandelbaum, "Democracy and Peace" dalam *Democracy's Good Name. The Rise and Risks of the World's Most Popular Form of Government* (New York: Public Affairs, 2007) hal. 145

2. Model Sistem Politik

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis juga mencoba untuk mendeskripsikannya dengan menggunakan sebuah teori yang dikemukakan oleh David Easton, yaitu adalah Analisa Sistem Politik.¹⁶ Dalam analisis tersebut, David Easton mengajak kita untuk menggunakan suatu metode untuk menganalisa berbagai system politik. Menurut David Easton, terdapat beberapa konsep yang dapat disusun secara sistematis sehingga akan memberi penjelasan singkat tentang cara bekerja system politik. Konsep-konsep tersebut adalah konsep input, konsep tuntutan, konsep dukungan, konsep konversi, konsep output, konsep ganjaran, konsep hukuman, serta konsep umpan balik.

Definisi umum Sistem politik yaitu, Sistem Politik merupakan suatu system interaksi atau hubungan di dalam masyarakat dimana melalui system tersebut dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat dan pengalokasian nilai-nilai tersebut dengan menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

Studi politik mencoba untuk dapat member penjelasan dan dapat dimengerti tentang bagaimana berbagai keputusan yang sah atau otoritatif dapat dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Kehidupan politik dapat kita mengerti apabila kita melihat dari satu aspek saja, akan tetapi dari setiap aspeknya.

David Easton adalah teoritis pertama yang memperkenalkan system dalam ilmu politik. Menurut pendekatan ini, setiap system tentu bersifat : terdiri dari banyak bagian, bagian-bagian tersebut saling berinteraksi dan saling bergantung, dan system tersebut juga mempunyai batasan yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari system-sistem lainnya.¹⁷

A. Input

Dalam skema di atas, input terbagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan merupakan keinginan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan. Apabila tuntutan-tuntutan atau kehendak-kehendak itu disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat maka berbagai tuntutan tersebut telah menjadi input-input dalam system politik.

Input-input ini kemudian diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam system tersebut menjadi output, kemudian output-output tersebut menimbulkan pengaruh terhadap system sendiri maupun terhadap lingkungan lingkungan dimana system tersebut berada.

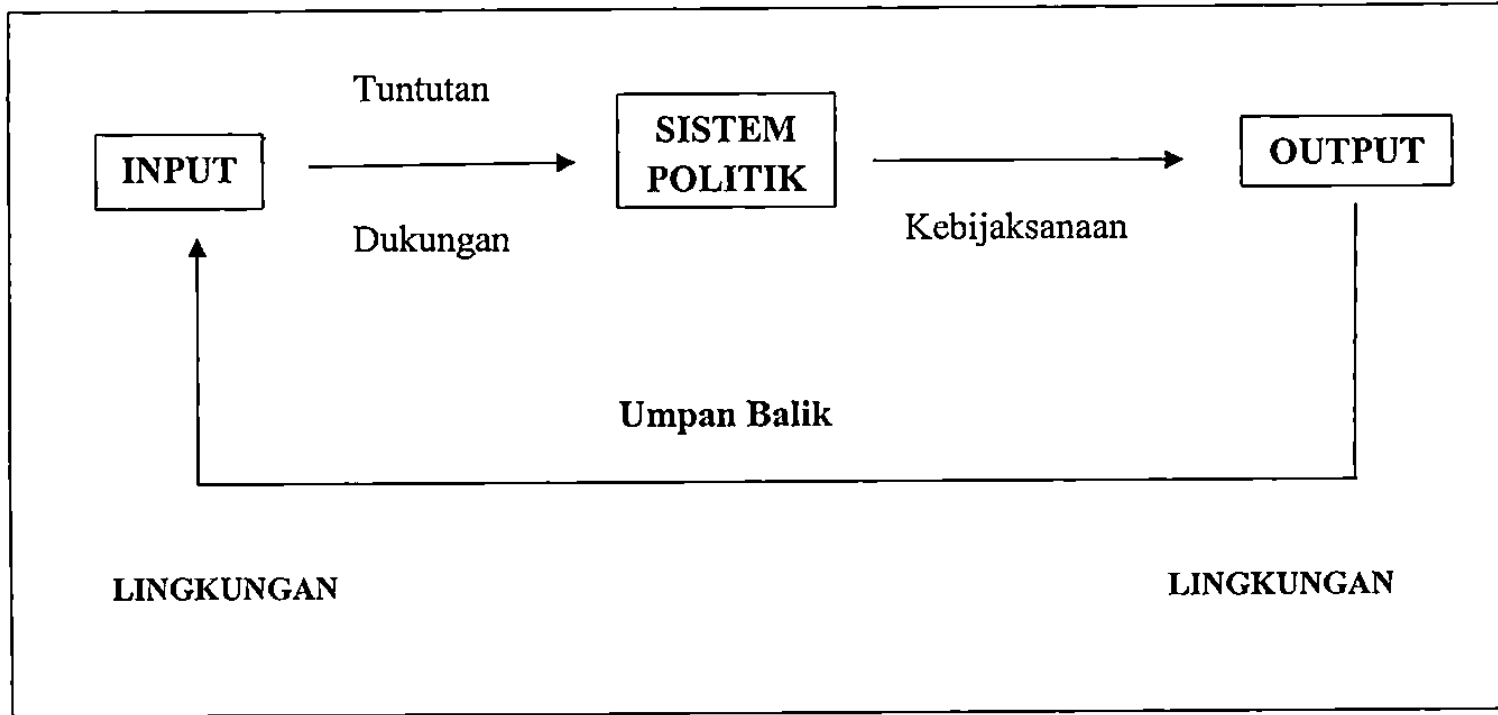
B. Output

Berasal dari input, yang berupa tuntutan dan dukungan, akan terjadi suatu proses system politik yang menghasilkan output. Output merupakan keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan. Maka pada pemerintah terletak tanggung jawab besar dan tinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Output dari suatu system politik adalah berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Sebagai sebuah hasil kerja system politik, maka sebuah output tetaplah mempunyai kaitan dengan input yang berupa dukungan dan tuntutan yang telah berperan penting sebagai bahan dasar terbentuknya output berupa keputusan atau kebijaksanaan politik.

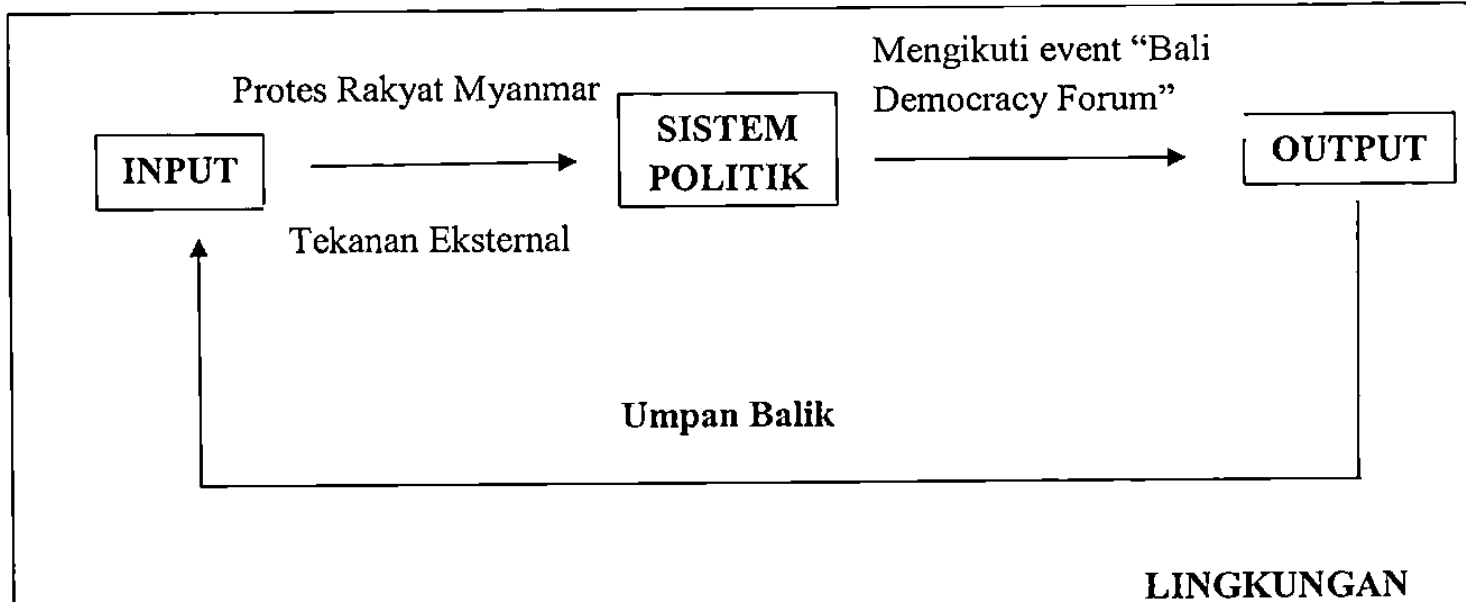
Output dapat dipahami sebagai konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari bekerjanya sebuah system politik yang menghasilkan keputusan dan kebijaksanaan adalah merupakan sebuah produk yang lahir dari tuntutan dan dukungan yang timbul dari masyarakat. Sebuah kebijaksanaan politik muncul dari suasana yang mendukung atau bahkan menolak munculnya kebijaksanaan politik yang diperoleh dari system politik tersebut

Untuk dapat memahami lebih lanjut, berikut ini merupakan skema dari system politik yang dimaksud :



Gb.1.1, Sumber: Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University

Berdasarkan teori diatas, maka pengaplikasiannya sebagai berikut : Gb. 1.2



sendiri dalam posisi penting dalam kekuasaan, setidaknya, tidak secara resmi apabila ingin meletakkan orang-orang mereka sendiri. Akan tetapi sebenarnya kelompok-kelompok penekan tertentu memiliki perwakilan di pemerintahan dan di badan-badan legislatif, meskipun hubungan antara para individu itu dengan kelompok yang mereka wakili tetap rahasia atau sangat hati-hati.

Secara komprehensif, kegiatan ebuah Kelompok Penekan terbagi menjadi dua tingkatan, yakni sebagai berikut ini¹⁸ :

Tingkatan Pertama adalah mereka secara langsung menekan organ-organ pemerintahan (para menteri, anggota parlemen, para pejabat tinggi). Dalam tingkat awal ini terdapat Tindakan Terbuka dan Tersembunyi, sebagai tindakan terbuka kadang telah diakui dan kentara sekali diketahui orang banyak.

Tingkatan Kedua, mereka melancarkan pengaruhnya secara tidak langsung pada warga masyarakat dengan membentuk pendapat umum. Dimana pada gilirannya akan mempengaruhi para pejabat pemerintah, yang biasanya selalu perhatian pada pendapat umum. Dalam membentuk pendapat umum supaya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah adalah dengan propaganda. Yakni mereka menyebarkan berbagai berita dan informasi yang sudah diubah dalam arti yang lebih cenderung kepada arah yang dikehendaki mereka kepada rakyat umum.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut ini :

Myanmar merupakan sebuah negara otoriter, yang turut berpartisipasi dalam event Bali Democracy Forum, dikarenakan:

1. Adanya Tekanan Internal di Myanmar berupa keinginan rakyat Myanmar untuk Demokrasi. Selain itu juga adanya Tekanan Eksternal kepada pemerintahan Junta Militer Myanmar dari dunia Internasional .
2. Adanya manfaat yang didapat pemerintah junta militer dengan keikutsertaanya pada event Bali Democracy Forum, yaitu mulai terjalin hubungan baik dengan dunia internasional dan mengalirnya berbagai macam jenis bantuan dari luar negeri untuk Myanmar.

E. Tujuan Penelitian

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang alasan Pemerintah Myanmar mengenai keikutsertaanya dalam event demokrasi yang diadakan pertama kali di Asia, Bali Democracy Forum.

2. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik dan Administrasi Ilmu Hubungan Internasional Universitas

3. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai negara Myanmar dan event Bali Democracy Forum yang diadakan oleh pemerintah Indonesia..

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengerjaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena atau gambaran tertentu atas data yang bersifat kualitatif yang dianalisa dengan menggunakan teori serta konsep yang telah dipilih agar sesuai.

Dalam penelitian, penulis didukung oleh berbagai data yang akurat, terbaru serta terpercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perolehan data dilakukan melalui :

- Data Primer

Adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mencari berbagai data melalui observasi langsung maupun dengan interview dengan badan penyelenggara event Bali Democracy Forum tersebut, yang dalam hal ini adalah Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan

- **Data Sekunder**

Adalah teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber, misalnya buku, kliping, jurnal, koran, internet, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memberi batasan agar penulisan ini tetap terfokus, maka penulis memberii batasan penulisan. Jangkauan penelitian dimulai dari pasca berlangsungnya Event Bali Democracy Forum 2009. selain itu, juga pada saat Pra event Bali Democracy Forum 2010 dan saat berlangsungnya event tersebut. Di samping itu tidak menutup kemungkinan penulis juga mencoba untuk menganalisa pasca event Bali Democracy Forum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Bab ini akan memaparkan tentang Dinamika Umum Negara Myanmar, yang akan terdiri dari Sistem Politik dan Sistem Pemerintahan yang digunakan oleh Pemerintah

Myanmar. Saat ini sedang dalam negeri Myanmar dimana

sebagian besar masyarakatnya menolak pemerintahan Junta Militer dan menuntut sistem demokratis.

BAB III

Bab ini akan menjelaskan lebih jauh tentang event Bali Democracy Forum, yang akan berisi mengenai Latar Belakang dilaksanakannya event ini, Visi dan Misi, Tema BDF, Para peserta Forum dan juga mengenai tanggapan masyarakat luas terhadap penyelenggaraan event ini yang akan diuraikan singkat.

BAB IV

Bab ini akan memaparkan tentang Kepentingan Myanmar dalam keikutsertaannya di event Bali Democracy Forum, sejak kapan dan bagaimana keaktifan negara ini dalam event tersebut. Selain itu juga akan menjadi suatu bukti atas hipotesa.

BAB V

Bab ini berisi tentang kesimpulan.